



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016

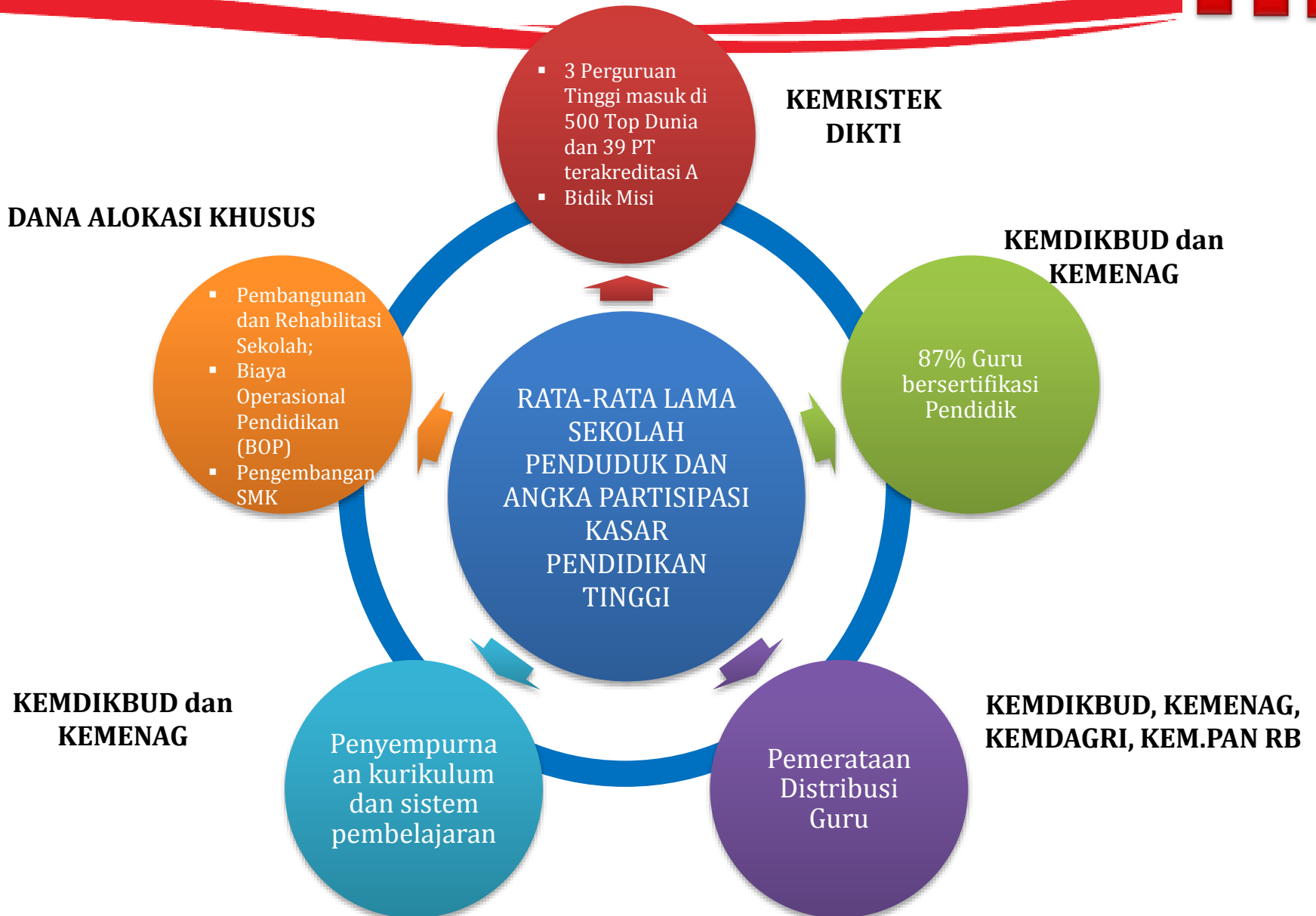
Oleh:

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**DISAMPAIKAN DALAM SIDANG KABINET
BOGOR, 8 DESEMBER 2015**



PENDIDIKAN





KESEHATAN

DANA ALOKASI KHUSUS

DAERAH

KEMEN PU & PERA

KEMENPORA

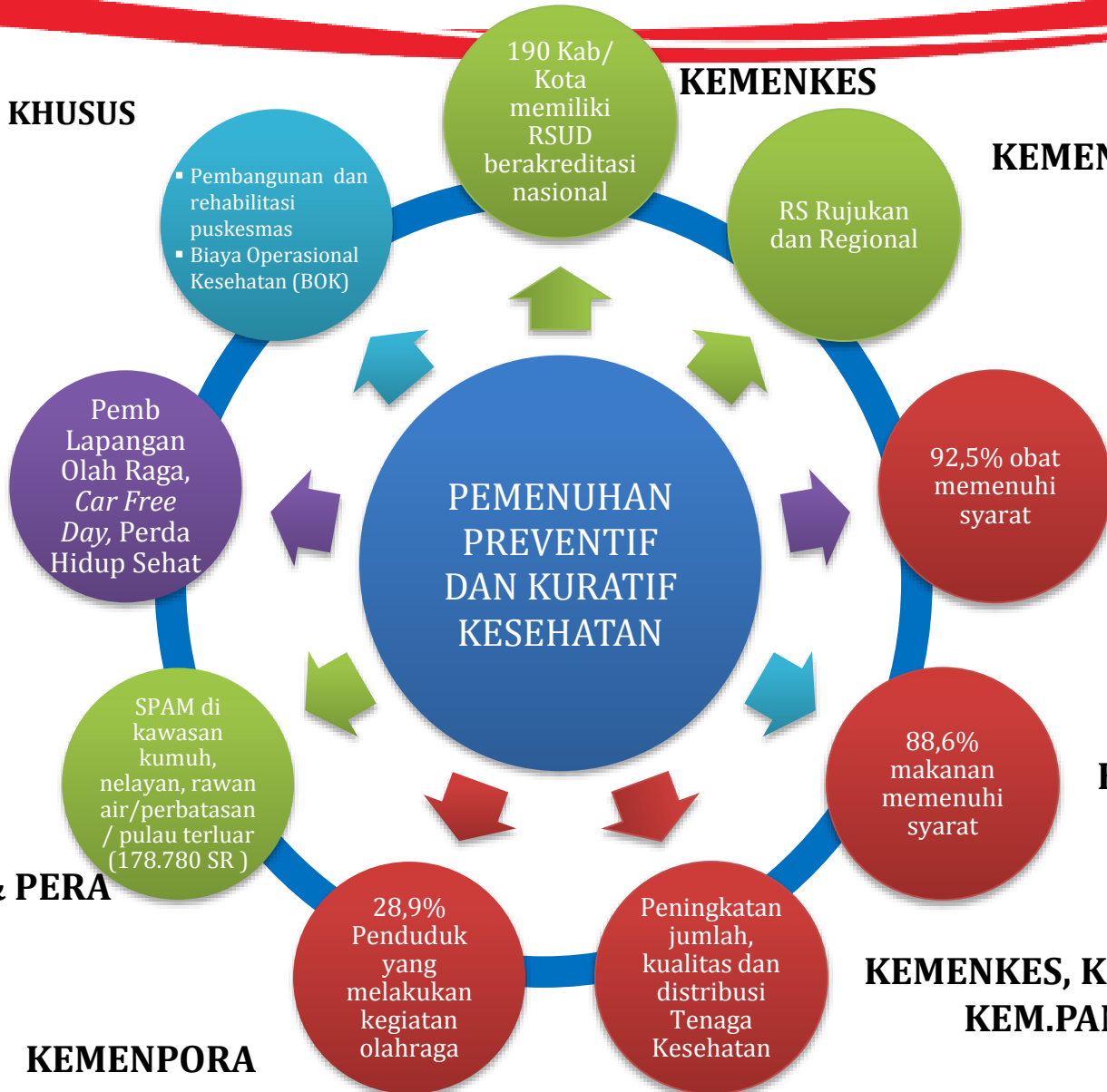
KEMENKES

KEMENKES

BPOM

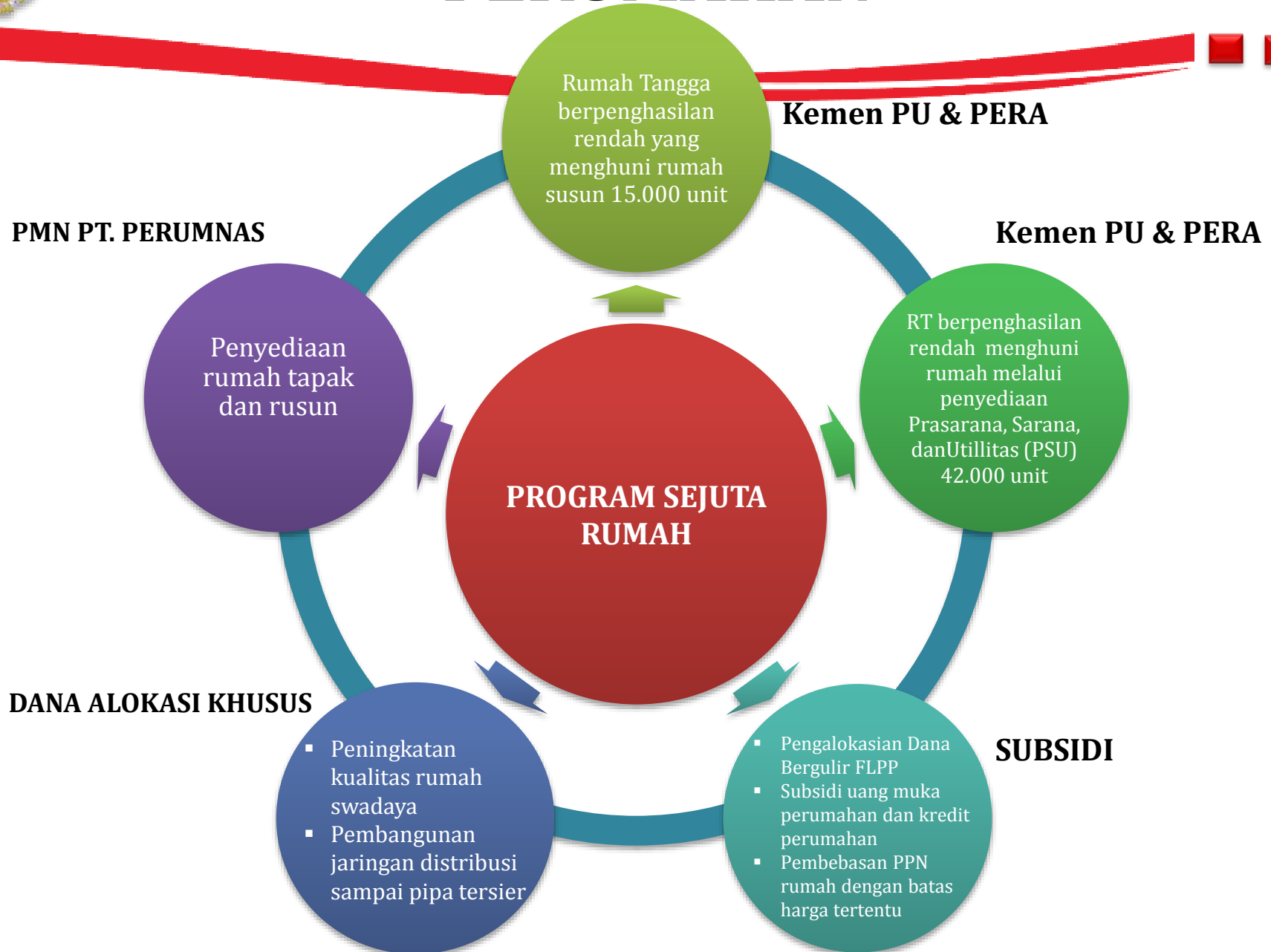
BPOM

**KEMENKES, KEMDAGRI,
KEM.PAN RB**



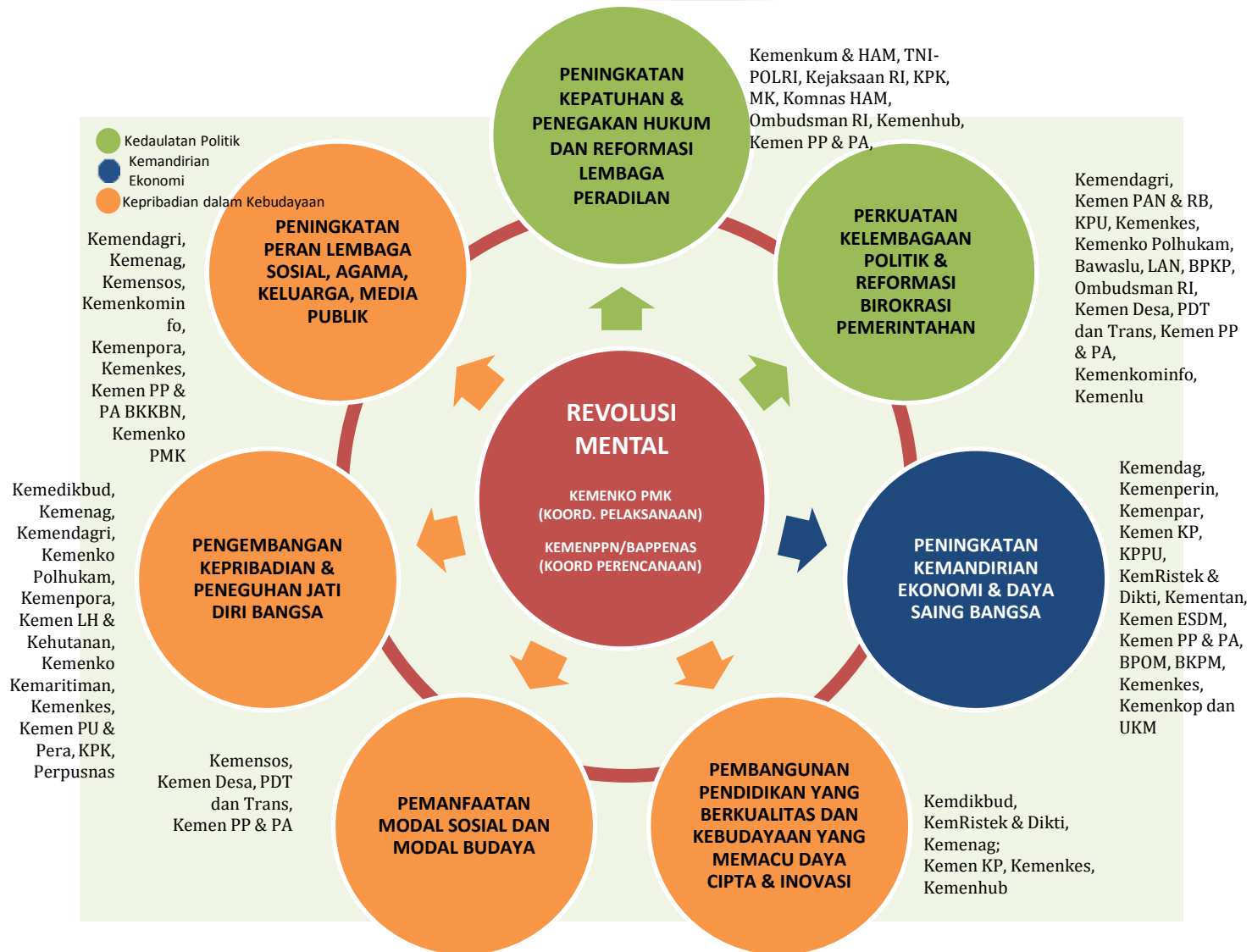


PERUMAHAN





REVOLUSI MENTAL

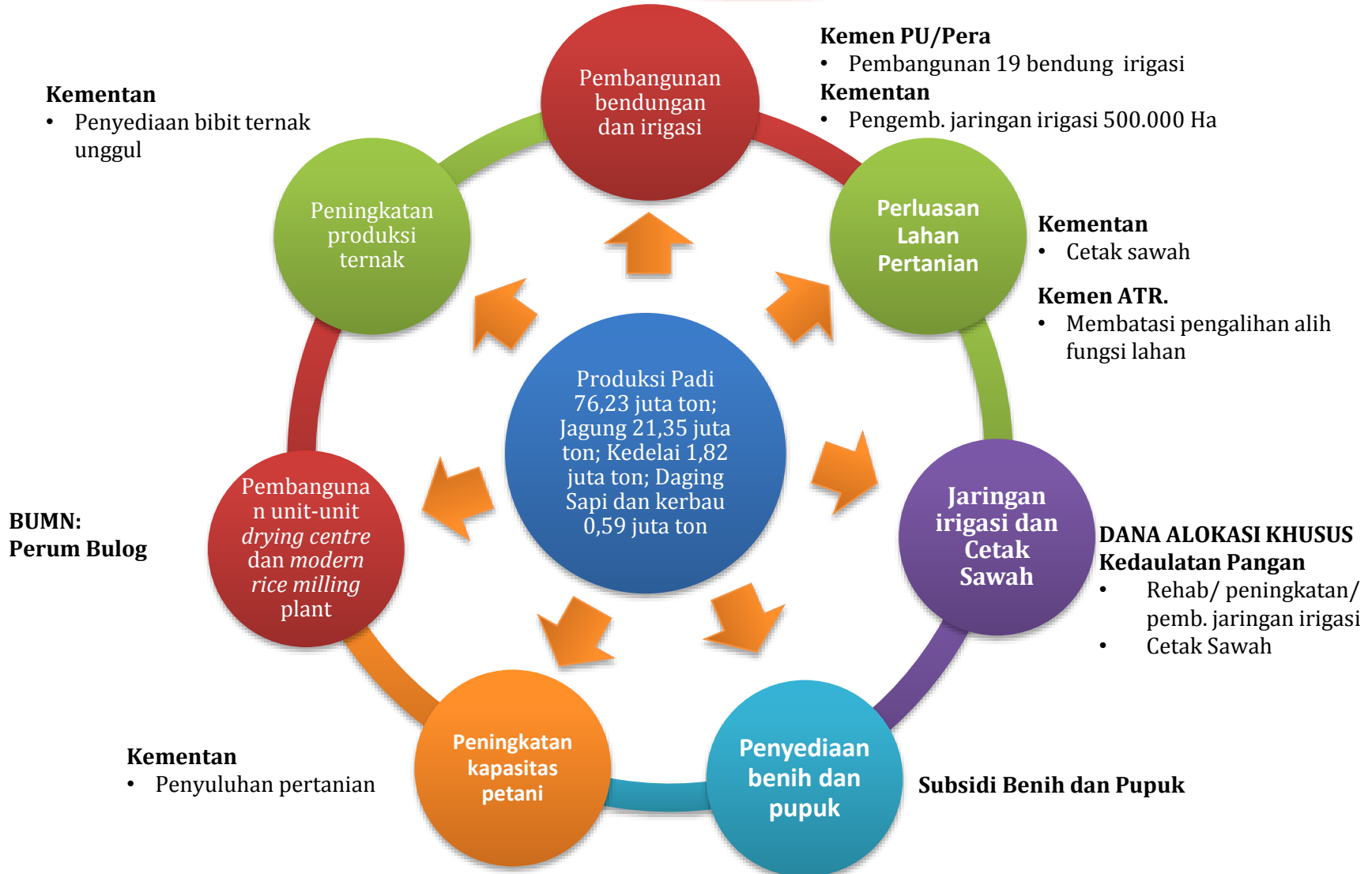




2B. DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

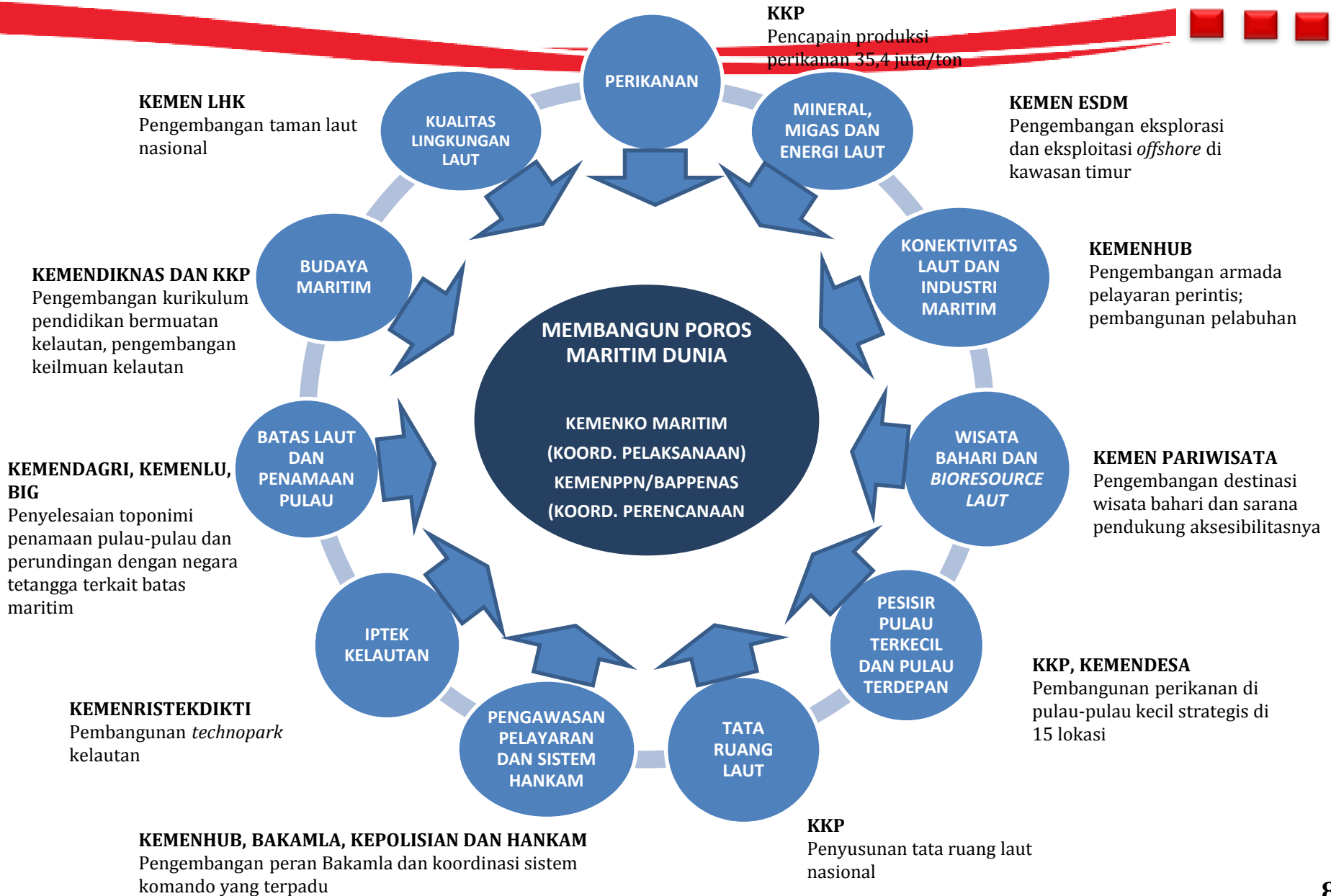


KEDAULATAN PANGAN





MEMBANGUN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA





KEDAULATAN ENERGI

DANA ALOKASI KHUSUS

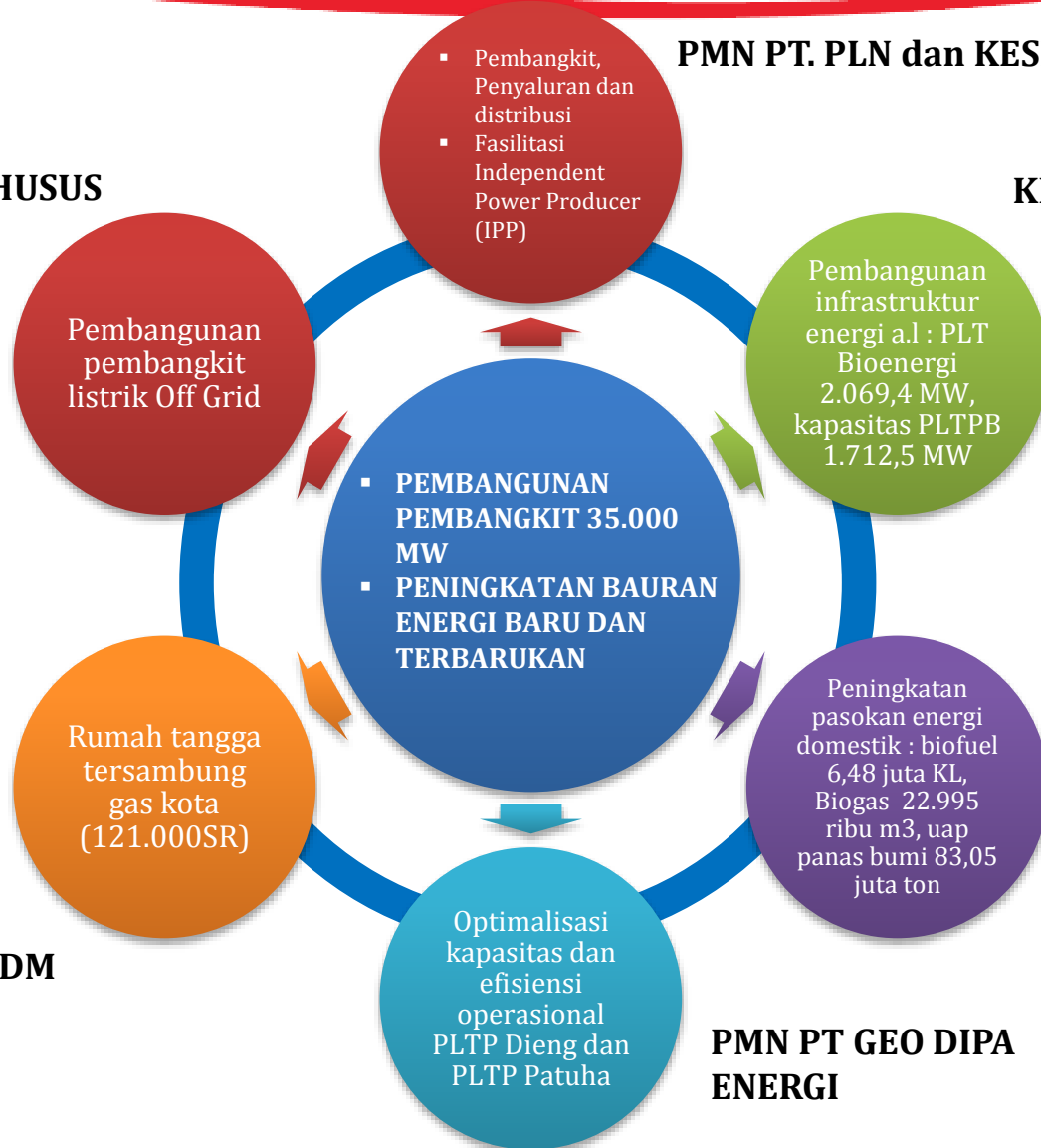
PMN PT. PLN dan KESDM

KESDM

KESDM

PMN PT GEO DIPA ENERGI

KESDM





PARIWISATA

DANA ALOKASI KHUSUS Pariwisata

- Penataan kawasan pariwisata
- Aksesibilitas kawasan

Kem Dikbud

- SMK Pariwisata

Kemenpar

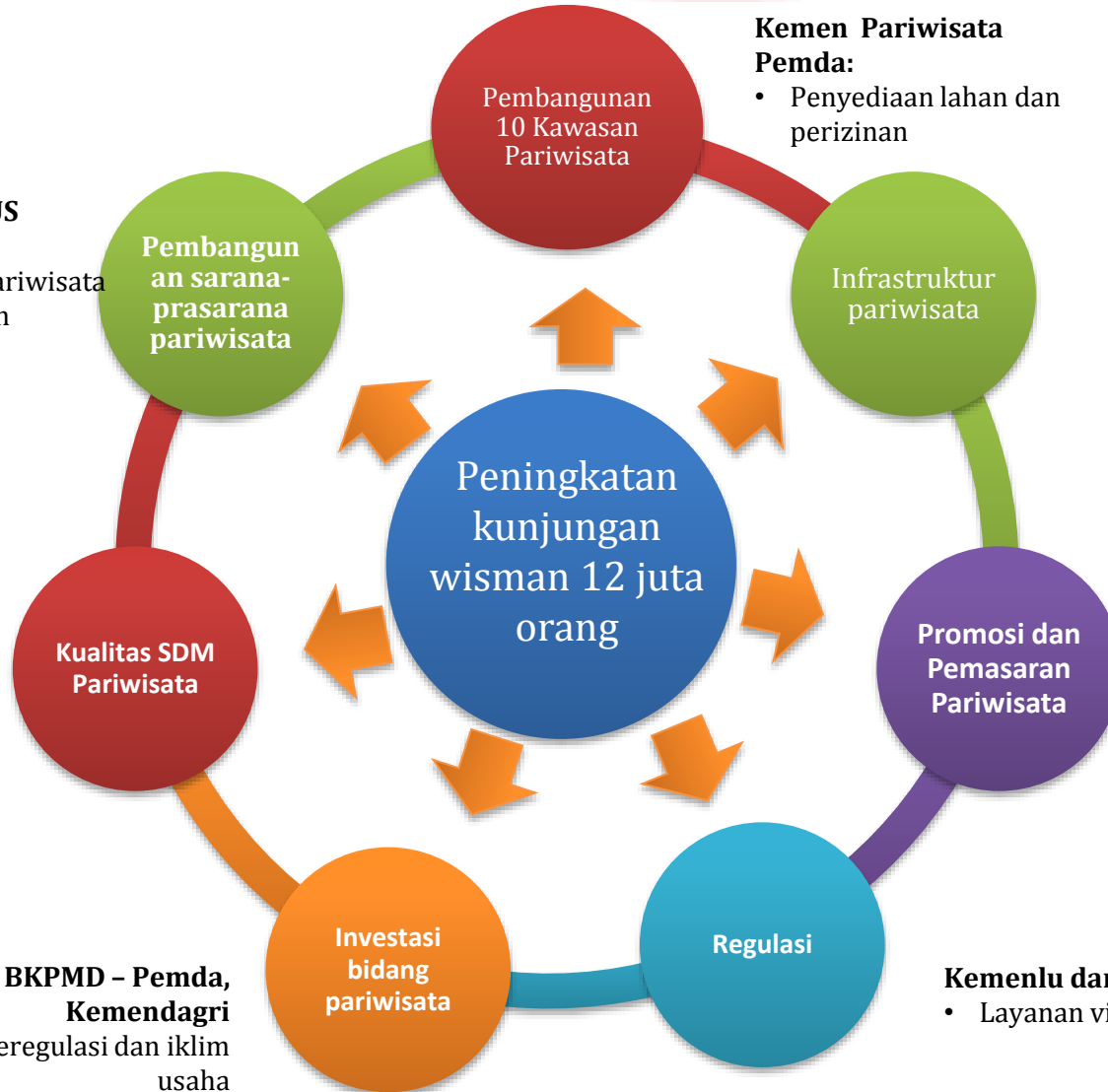
- Sekolah Tinggi Pariwisata

Kemen Tenaga Kerja

- Balai Latihan Kerja

BKPM, BKPMD – Pemda, Kemendagri

- Deregulasi dan iklim usaha



Kemen Pariwisata Pemda:

- Penyediaan lahan dan perizinan

Kemen PU/Pera

- Jalan akses
- Air dan Sanitasi

Kemen Perhubungan

- Transportasi Darat, Laut dan Udara

Kemenpar

- Pengembangan destinasi
- Penyelenggaraan event

Kominfo

- Jaringan broadcast

Kemenlu

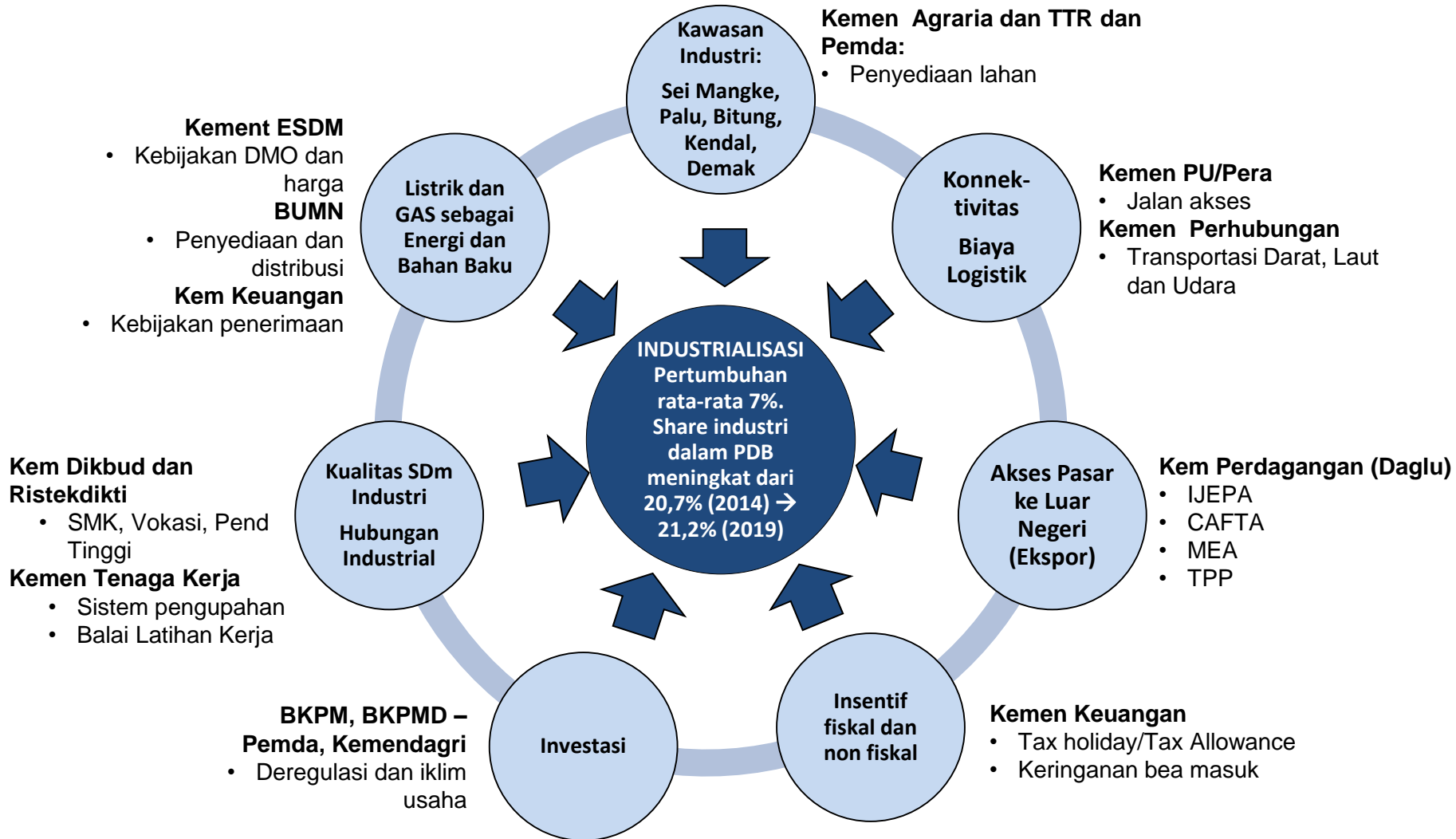
- Pemasaran pariwisata di LN

Kemenlu dan Kemenkumham

- Layanan visa on arrival



INDUSTRIALISASI





2C. DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

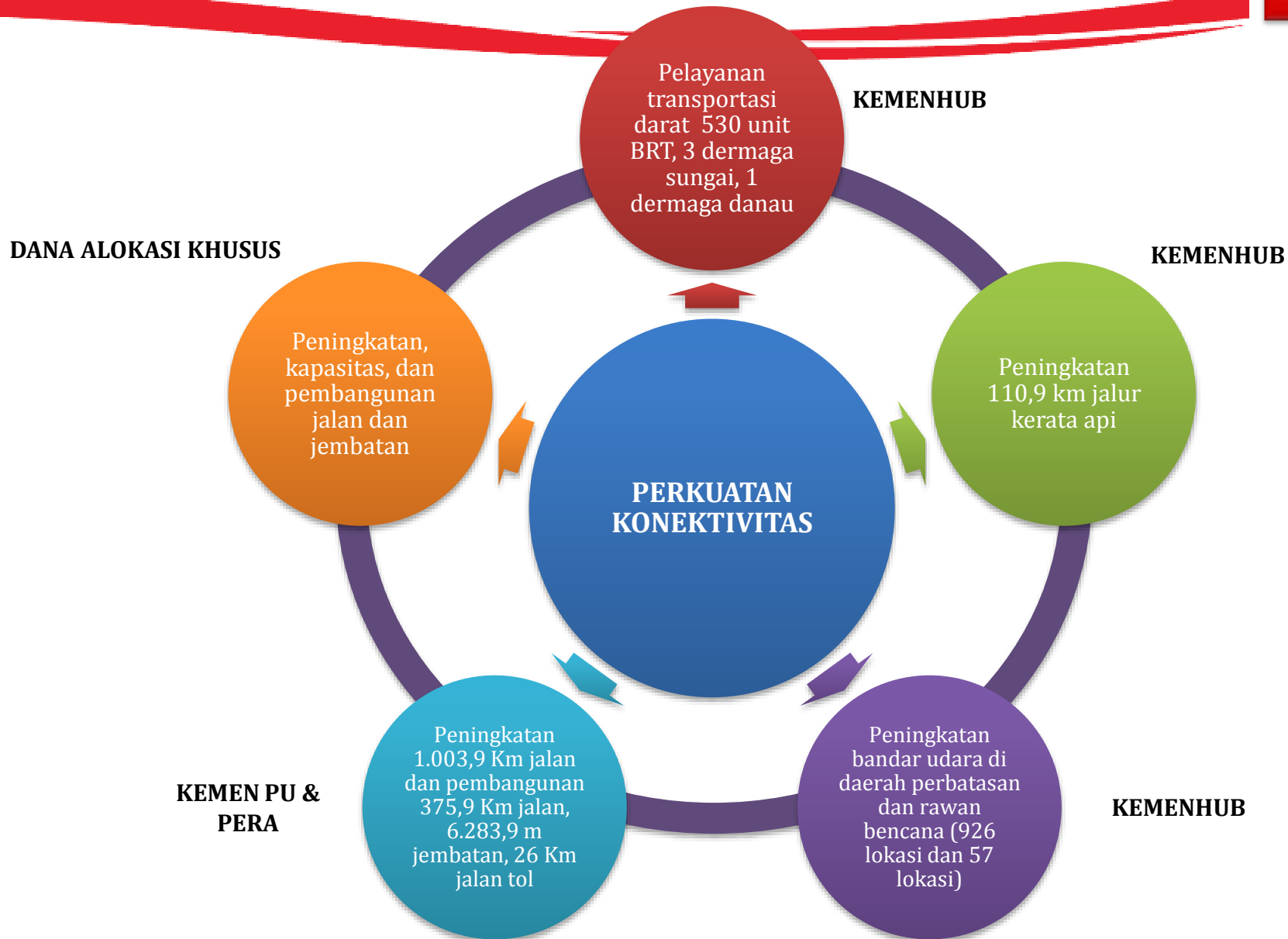


PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN





PEMERATAAN ANTAR WILAYAH

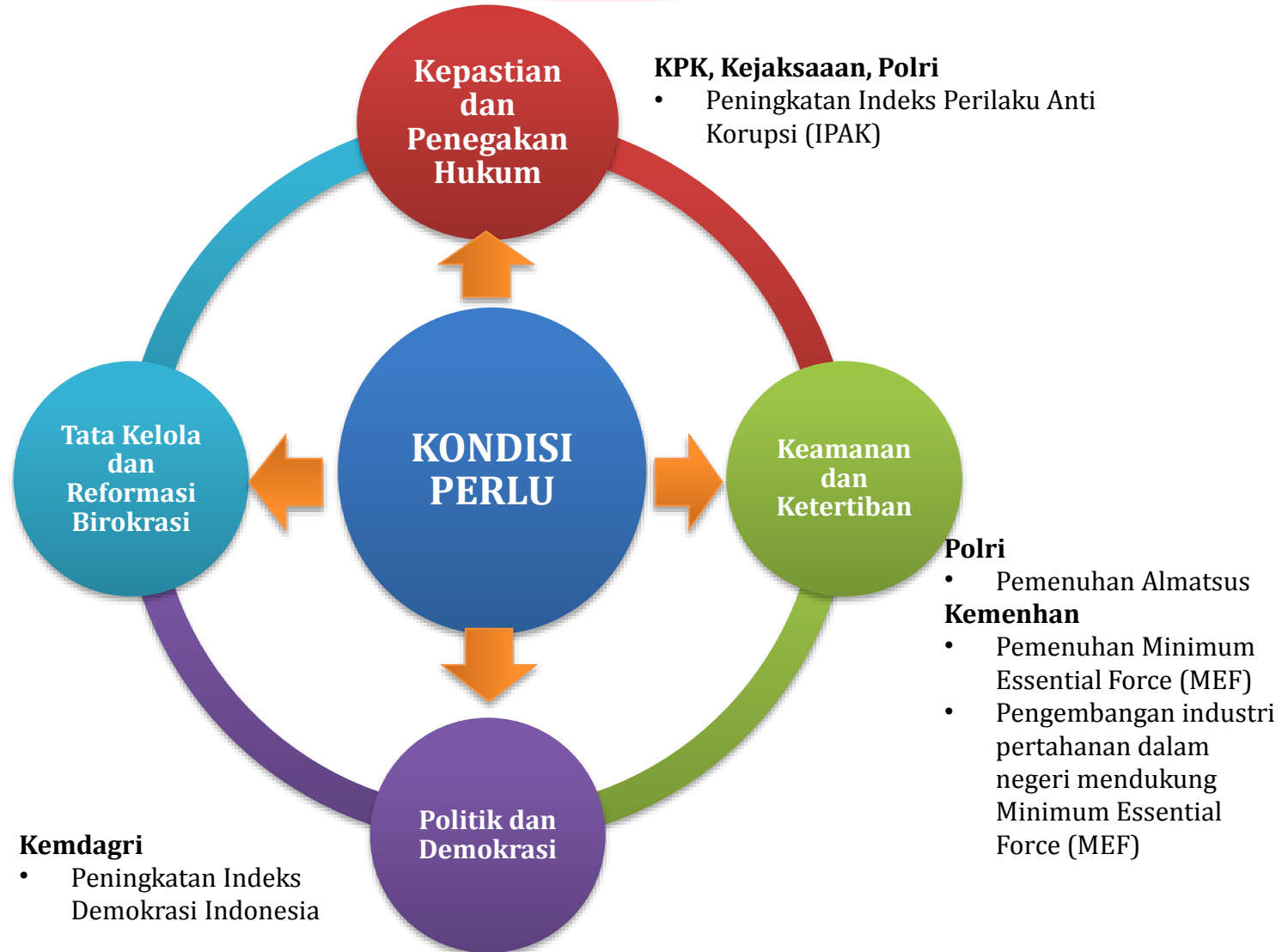




2D. KONDISI PERLU



KONDISI PERLU

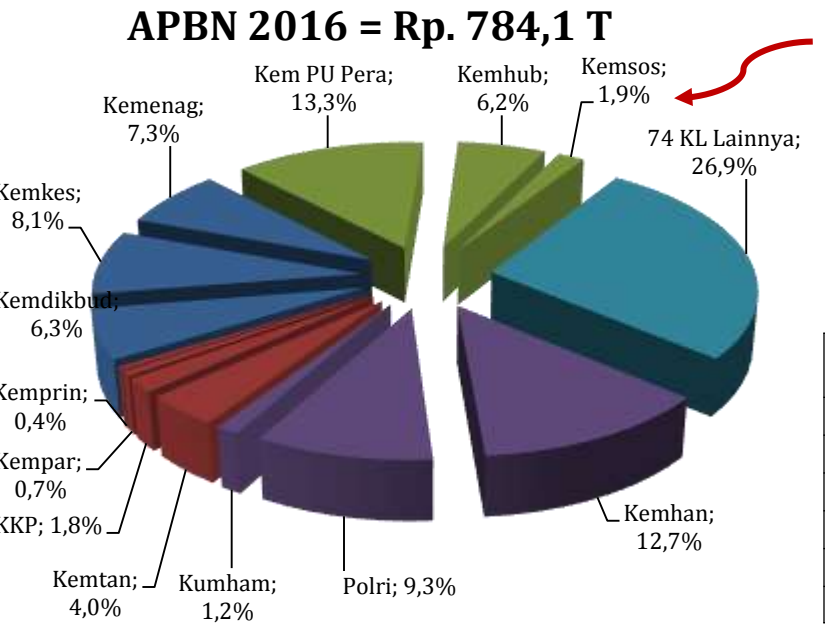
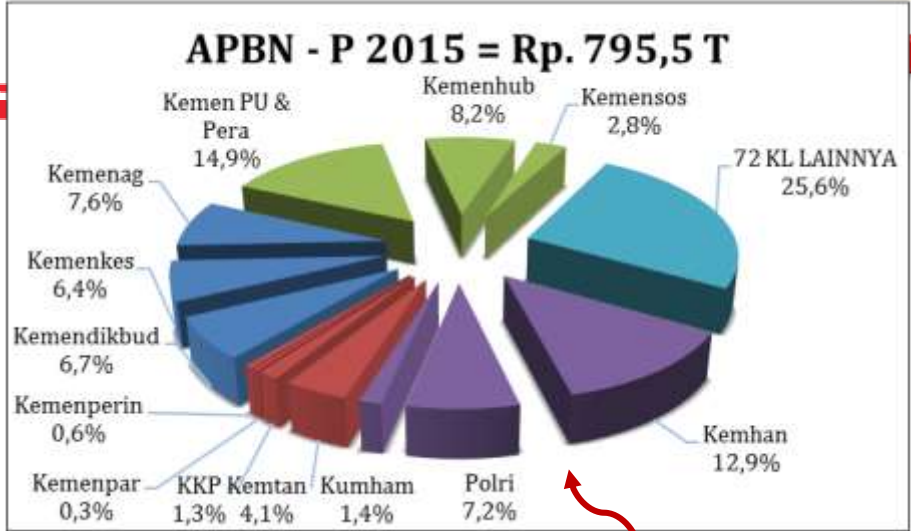
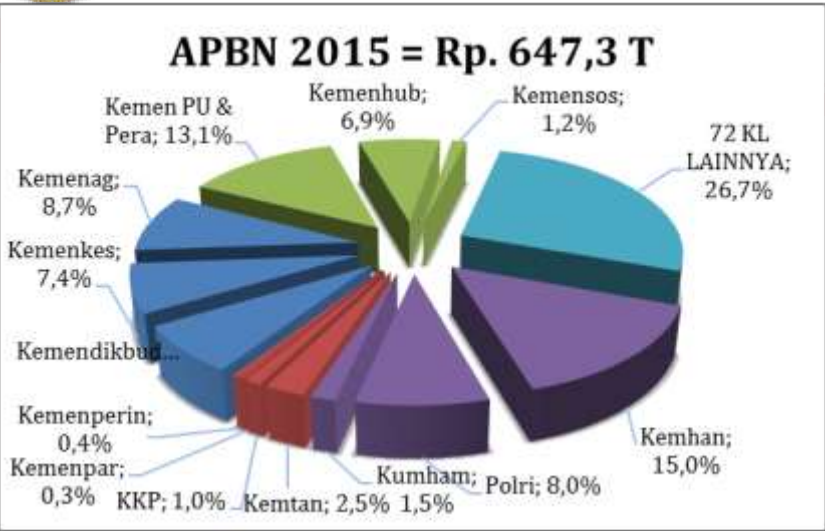




3. PEMANFAATAN ANGGARAN TAHUN 2016



PROPORSI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA



Kenaikan porsi di APBN 2016 antara lain :

- Kemenkes (Pemenuhan anggaran Kesehatan 5% APBN)
- Kemenpar (Peningkatan wisatawan)
- KKP (Perikanan rakyat dan *illegal fishing*)
- Kemtan (Kedaulatan Pangan)
- Polri (Dukungan Tusi)

Kenaikan porsi di APBN - P 2015 antara lain :

- Kemtan (Kedaulatan Pangan)
- Kemhub ((Pembangunan infrastruktur kewilayahan dan Kemaritiman)
- Kemen PU & Pera (Pembangunan infrastruktur kewilayahan)
- Kemensos (KKS)

KETERANGAN*)	APBN 2015	APBN-P 2015	APBN 2016
Dimensi Pemb. Manusia dan Masyarakat	151,0	164,8	169,8
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan	27,1	50,4	54,0
Dimensi Pemertaaan dan Kewilayahan	137,9	205,9	167,2
Kondisi Perlu	158,2	170,6	182,0
Lainnya	173,1	203,8	211,1
Total	647,3	795,5	784,1

*) Hanya mencerminkan beberapa KL utama

**) Alokasi program pembangunan APBN 2016 relatif sama dengan APBN 2015

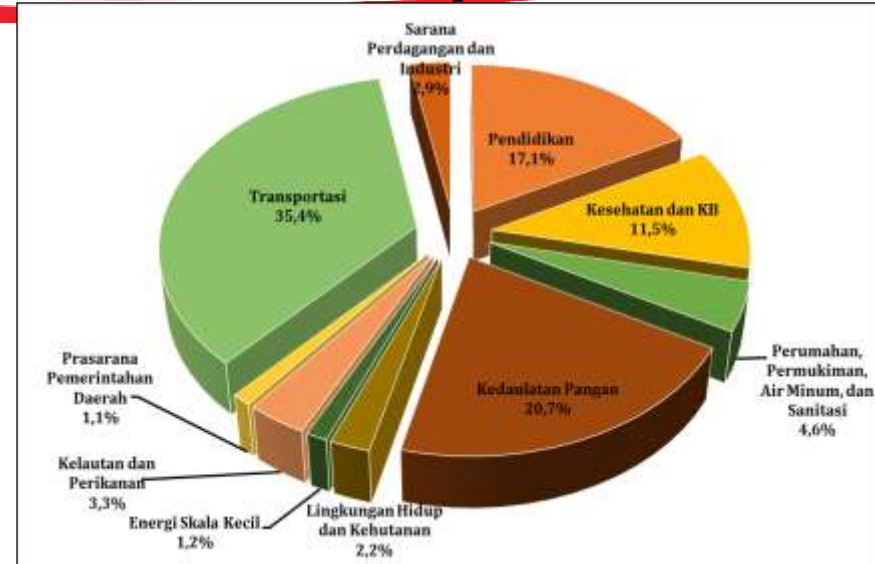
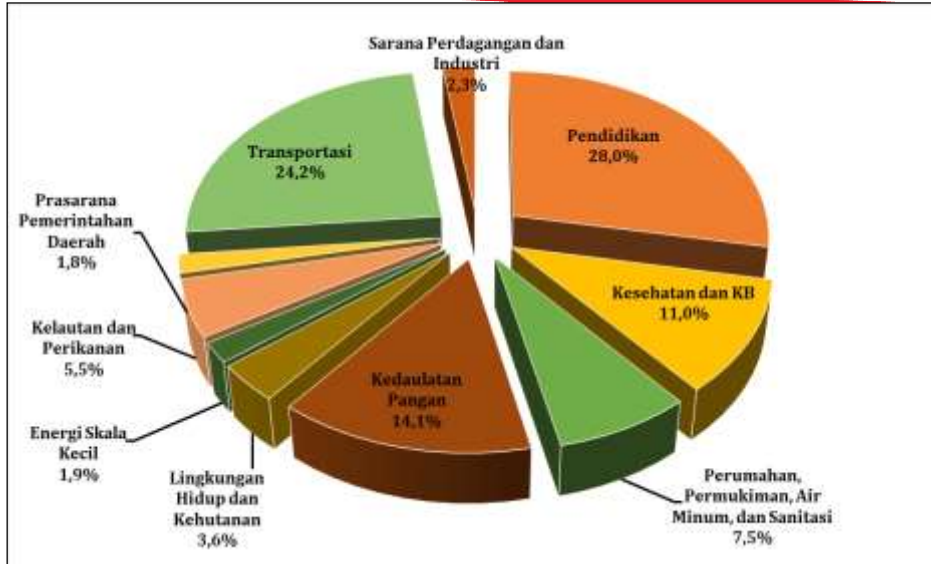
Alokasi Belanja KL tidak "As Usual" melainkan karena Penekanan pada Prioritas



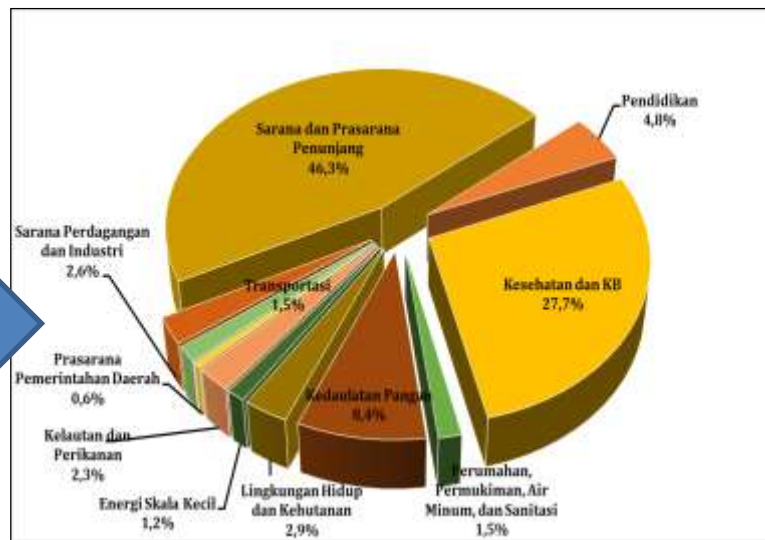
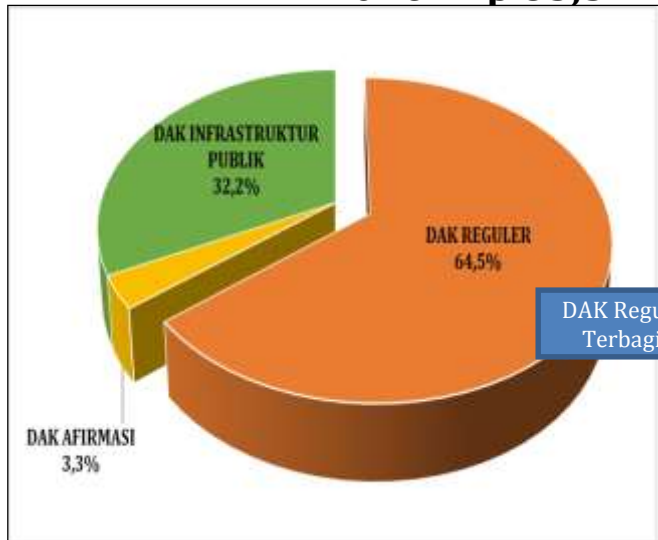
PROPORSI ALOKASI DAK FISIK PER BIDANG

APBN 2015 : Rp 35,8 T

APBN-P 2015 : Rp 58,8 T



APBN 2016 : Rp 85,5 T



Ket :

- Untuk TA 2016 DAK terbagi menjadi 3 Jenis yaitu DAK Reguler, DAK Afirmasi dan DAK Infrastruktur Publik
- DAK Afirmasi terdiri atas Sub Bidang Air Minum, Sanitasi, Irigasi, Jalan dan Transportasi Perdesaaan.
- Dalam DAK Reguler TA 2016 terdapat Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang yang dengan Sub Bidang:
 - Jalan
 - Sarpras Irigasi & Air Minum
 - Sarpras Kesehatan



PEMBIAYAAN MELALUI SUBSIDI

URAIAN	NILAI (Rp. Trilyun)
1. Subsidi Energi	102,1
1) Subsidi BBM & LPG	63,7
2) Subsidi Listrik	38,4
2. Subsidi Non Energi	80,5
1) Pangan	21,0
2) Pupuk	30,1
3) Benih	1,0
4) PSO	3,8
a) PT. KAI	1,8
b) PT. Pelni	1,8
c) LKBN Antara	0,1
5) Subsidi Bunga Kredit Program	16,5
6) Subsidi Pajak/ Pajak DTP	8,2
JUMLAH	182,6

Sumber : Kementerian Keuangan



PEMBIAYAAN PMN*)

NO.	RINCIAN	APBN 2016 (Rp. Milyar)
KEDAULATAN PANGAN		4.221,9
1	Perum Bulog	2.000,0
2	PT. Perikanan Nusantara	29,4
3	PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI)	692,5
4	PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia	1.000,0
5	PT. Pertani	500,0
INFRASTRUKTUR DAN MARITIM		20.082,3
6	PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI)	3.500,0
7	PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF)	1.000,0
8	PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII)	1.000,0
9	PT. Hutama Karya	3.000,0
10	PT. Wijaya Karya	4.000,0
11	PT. Pembangunan Perumahan	2.250,0
12	Perum Perumnas	485,4
13	PT. Angkasa Pura II	2.000,0
14	PT. Peln	564,8
15	PT. Pelabuhan Indonesia III	1.000,0
16	PT. Amarta Karya	32,1
17	PT. Jasa Marga	1.250,0
KEDAULATAN ENERGI		10.660,0
18	PT. PLN	10.000,0
19	PT. Geo Dipa Energi	660,0
PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS		3.956,5
20	PT. Krakatau Steel	2.456,5
21	PT. Industri Kereta Api	1.000,0
22	PT. Bharata Indonesia	500,0
KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL		1.500,0
23	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI)	500,0
24	PT. Asuransi Kredit Indonesia	500,0
25	Perum Jamkrindo	500,0
JUMLAH		40.420,8

Sumber : Kementerian Keuangan

*) Pendanaan ditunda hingga APBN-P 2016



4. PENYEDERHANAAN “NOMENKLATUR”



PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR



- Peningkatan efektivitas program (meniadakan kebijakan yang “kurang jelas” manfaatnya)
- Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu (misal: Perjalanan Dinas, Sosialisasi, Kajian, Seminar)
- Hasil penyederhanaan direlokasi untuk memperkuat Kegiatan Prioritas
- Pendalaman dan relokasi agar tidak menghambat proses finalisasi dokumen anggaran tahun 2016



HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Memastikan kesiapan pelaksanaan :
 - Seluruh dokumen perencanaan teknis kegiatan yang dibutuhkan terutama untuk infrastruktur (misalnya Ketersediaan Tanah, DED, AMDAL, kesesuaian dengan RTRW)
 - Dokumen administrasi terkait anggaran (SK untuk Pejabat Pengelola Keuangan baik pusat dan daerah)
 - Seluruh Juklak dan Juknis Dana Alokasi Khusus



TERIMA KASIH



PERLINDUNGAN ANAK

The title "PERLINDUNGAN ANAK" (Child Protection) is centered on a light green horizontal bar. To the left of the bar, there is a vertical decorative element consisting of three stacked rectangular segments: orange at the top, green in the middle, and blue at the bottom. The text is rendered in a large, bold, black, all-caps serif font.



Sinergi Lintas Bidang dalam Mewujudkan Perlindungan Anak (1)





PERLINDUNGAN ANAK





Sinergi Lintas Bidang dalam Mewujudkan Perlindungan Anak (1)

uraian	target
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	79%
Jumlah kabupaten/kota yang diberi Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk Penguatan Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	505 kab/kota

Kemdagri:

- Cakupan akta kelahiran
- Ketersediaan Posyandu

uraian	target
APK sd/sdlb/paket a (%)	82,88%
% angka partisipasi kasar (apk) paud usia 3-6 tahun	74,3%
jumlah bahan kebijakan kurikulum dan perbukuan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan paudni	75
apk smp/smplb/paket b (%)	82,40%

Kemdikbud :

- Pendidikan anak usia dini
- Layanan pendidikan dasar

uraian	target
Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	2
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di K/L dan Provinsi	3
Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak pendidikan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	114
Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak kesehatan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	212

Uraian	target
Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	60,5%
Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe)	50

uraian	target
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	5100

Kominfo:

- Pengawasan informasi

KPPPA:

- Partisipasi anak
- Tenaga terlatih perlindungan anak

BKKBN:

- Bina Keluarga Balita (BKB)
- Bina Keluarga Remaja (BKR)

Uraian	tugas
APK MI/Ula	13,41%
APK MTs/Wustha	22,90%
APK MA/Ulya	9,06%
Jumlah Pembinaan Keluarga Sakinah	134

Kemenag:

- Layanan pendidikan dasar

Kemkes:

- Status Gizi anak
- Imunisasi lengkap

PEMENUHAN HAK ANAK



PENINGKATAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Uraian	tugas
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	85%
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92%
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	44%

Uraian	tugas
Jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak	14
Jumlah advokasi peraturan perundang-Undangan dengan stakeholder terkait perlindungan anak	14

KPAI:

- Pengawasan perlindungan anak



PERLINDUNGAN ANAK



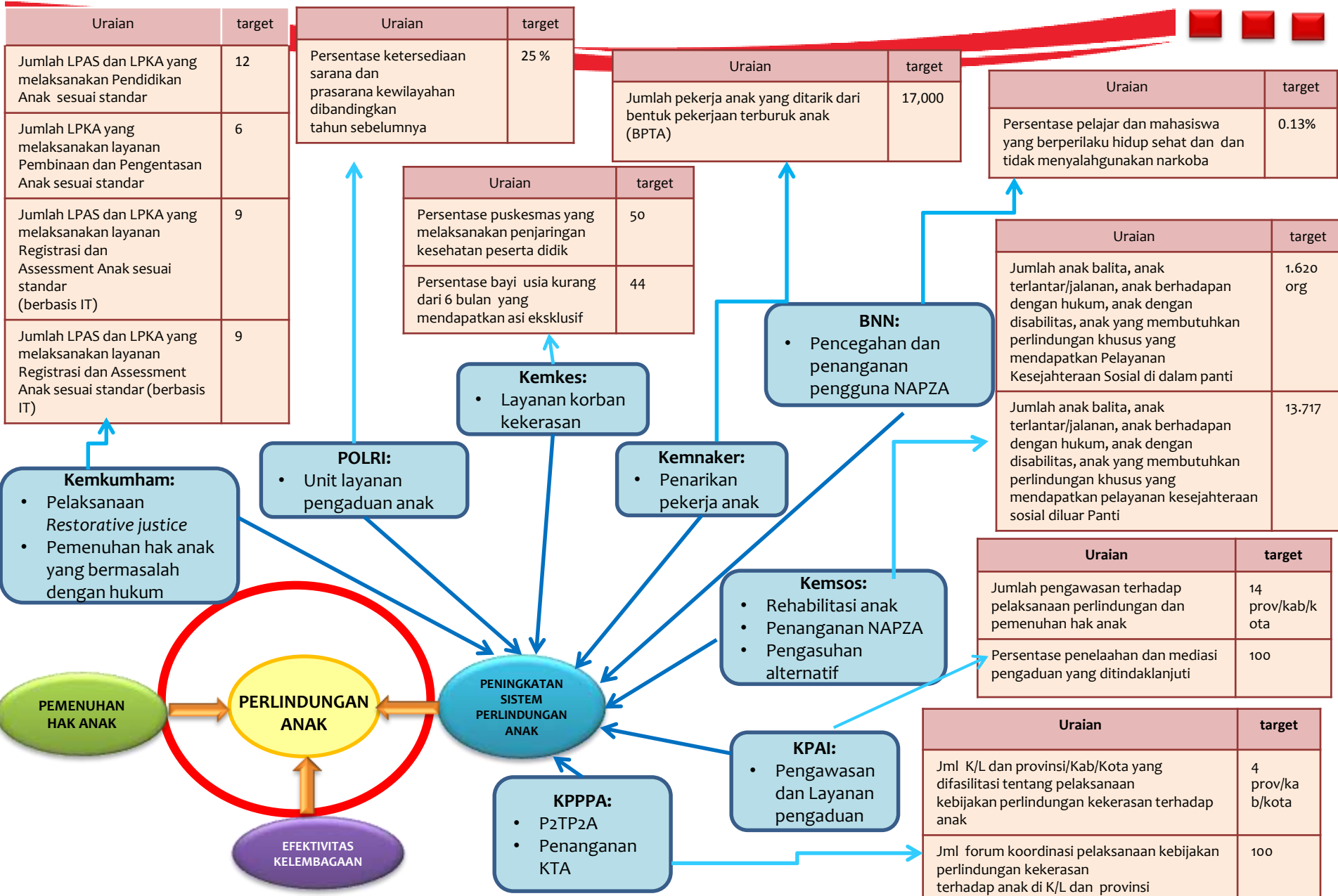


PERLINDUNGAN ANAK



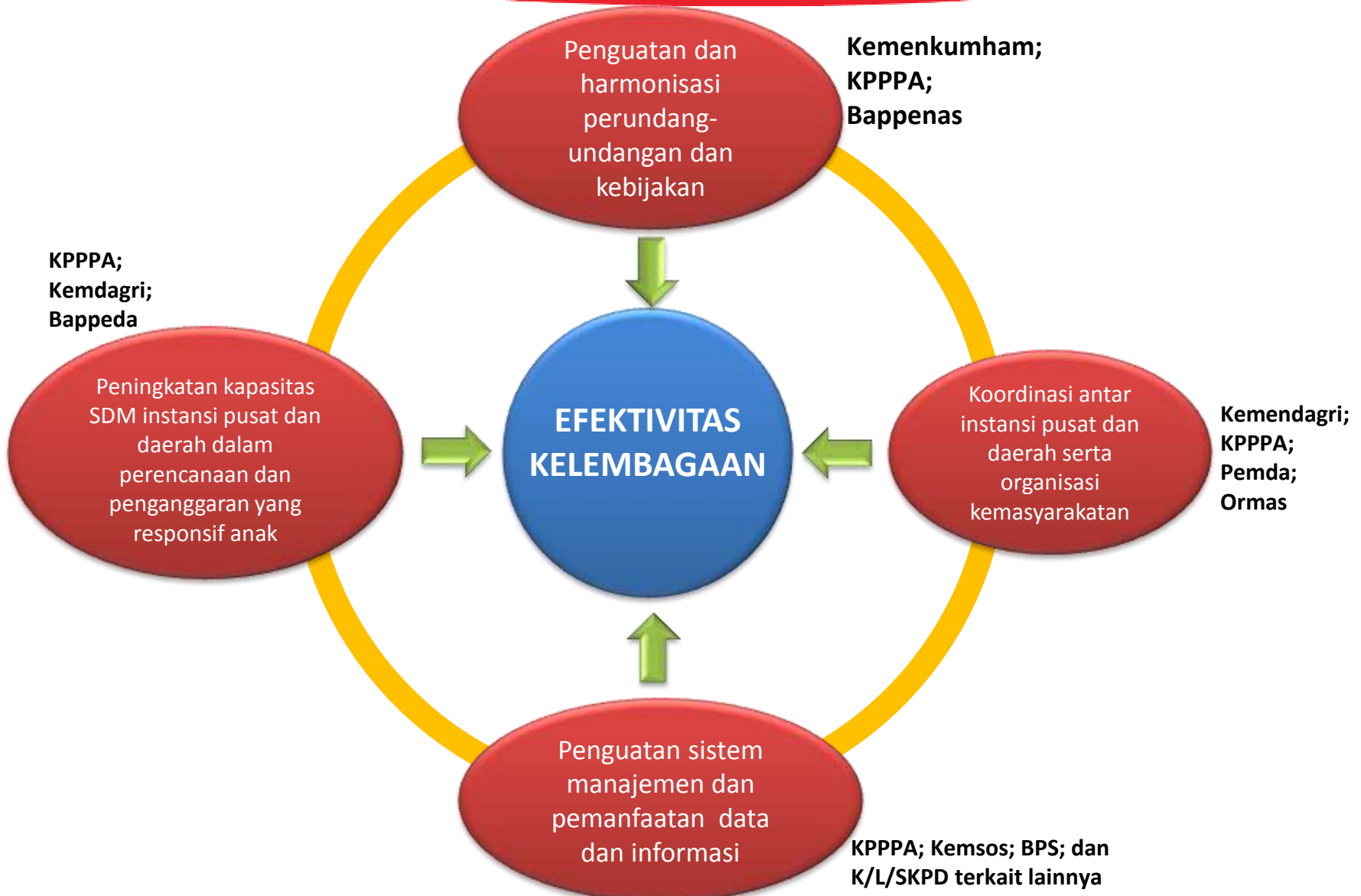


Sinergi Lintas Bidang dalam Mewujudkan Perlindungan Anak (2)





PERLINDUNGAN ANAK





Sinergi Lintas Bidang dalam Mewujudkan Perlindungan Anak (3)

uraian	target
Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	1260 org
Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS	795 org



Kemkumham:

- Pelatihan aparat penegak hukum

BPS:

- Survey data dasar

Uraian	Target
Jumlah satker yang memiliki website yang terhubung secara online	530

Kemdagri:

- Pelatihan stakeholder PA
- Data SIAK

Bappenas:

- Koordinasi perencanaan

Uraian	Target
% kesesuaian Renstra K/L dgn RPJMN	100%
% pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap prioritas nasional sesuai dengan rencana	100%

uraian	target
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan	34
Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online	505 kab/kota

KPPPA:

- Sistem data dan informasi PA
- Profil Anak
- Forum koordinasi
- Tenaga terlatih
- Kebijakan yang ramah anak

Kemko PMK:

- Koordinasi Pelaksanaan

uraian	target
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Peningkatan keluarga dan kesejahteraan anak	2
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak	2

Uraian	tgt
Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan kekerasan terhadap anak	6
Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak	3
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak di K/L dan provinsi	8
Jumlah K/L dan Provinsi yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak	4



Intervensi Sinergis Lintas Bidang Perlindungan Anak

